

# Manajemen Pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Edi Junaedi<sup>1</sup>, Enas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

email: [edi.junaedi8457@gmail.com](mailto:edi.junaedi8457@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

email: [enas.email@gmail.com](mailto:enas.email@gmail.com)

---

**Abstrak** – Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan BPMU dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan pada MAN 2 Ciamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah: (1) Dalam perencanaan pembiayaan BPMU terdapat item-item yang merupakan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan pada MAN 2 Ciamis yang dilaksanakan setiap awal tahun dalam sebuah rapat dengan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan diantaranya penetapan sasaran/tujuan, penetapan anggaran yang nantinya akan dituangkan dalam penyusunan RAPBS dan RKAS dengan menggunakan pedoman BPMU; (2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan BPMU diawali dengan penyusunan RAPBS dan RKAS. Selanjutnya realisasi dari hasil perencanaan adalah berisi kegiatan kebidaharaan di antaranya pengisian formulir pengajuan pencairan dana BPMU, penyaluran biaya, pembukuan anggaran dan penyusunan laporan; (3) Evaluasi pembiayaan berupa pengawasan dan monitoring yang dilakukan dari pihak intern yaitu kepala sekolah, komite sekolah ekstern dilakukan oleh Tim Pengelola BPMU Provinsi terhadap Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota atau terhadap sekolah/madrasah. Pengawasan dan monitoring yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

**Kata Kunci:** Manajemen Pembiayaan; Bantuan Pendidikan Menengah; Mutu Layanan Pendidikan

---

## 1. Pendahuluan

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, dipihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat telah semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan, disamping juga pentingnya pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan (Herlina, 2017). Pelayanan pendidikan yang bermutu itu amat penting agar konsumen (pelanggan) memperoleh kepuasan layanan dari jasa pendidikan yang diberikan sekolah, sebab para siswa dan masyarakat selaku pelanggan jasa pendidikan menaruh harapan yang besar terhadap sekolah dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan kehidupan di masa yang datang, terlebih peningkatan mutu pendidikan yang sudah diperoleh belum menggembirakan.

Salah satu permasalahan mendasar pada manajemen pembiayaan pendidikan adalah bagaimana sebuah lembaga mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengawasi pembiayaan pendidikan agar madrasah dapat berjalan sesuai sistem dan menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dan cakap. Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan di

madrasah/sekolah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan orangtua siswa. Disadari bahwa anggaran pembiayaan bukan merupakan satu-satunya faktor penentu agar pendidikan lebih berkualitas, namun tanpa pembiayaan yang cukup akan sulit mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Sumbangan dana pendidikan baik dari pemerintah maupun perusahaan menuntut pengelolaan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, ke pos mana dana tersebut di tempatkan agar berdaya manfaat pada siswa, dan dapat membantu pembiayaan pendidikan yang belum teranggarkan di RAPBM.

Secara aplikatif, penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya. Hal ini disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah maupun madrasah dalam segala aktivitasnya, memerlukan sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program, dan kesejahteraan para guru dan karyawan yang ada. Semua itu memerlukan anggaran dana. Yang menjadi masalah adalah, bagaimana masalah pembiayaan dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan. Lebih dari itu, problem yang sering muncul di permukaan adalah bahwa lembaga pendidikan tidak mampu mengelola dengan baik anggaran yang ada, sehingga mengalami kesenjangan dalam pelaksanaan. Keterbatasan dana menuntut pengelola lembaga pendidikan untuk kreatif, peka terhadap peluang, membangun relasi, serta mengelola dana yang ada dengan baik.

Dalam hal pemenuhan Standar Pembiayaan dan dalam rangka Pencapaian Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2013 telah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah di seluruh Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini adalah program utama dari perwujudan program PMU, dengan maksud memberikan bantuan kepada sekolah/madrasah untuk memenuhi biaya operasional sekolah/madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Meskipun demikian, berbeda dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang merupakan amanah dari undang-undang, maka Wajib Belajar 12 Tahun belum ada undangundangnya serta belum memiliki landasan hukum. Untuk mendukung program BOS Pusat pada sekolah menengah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2014 menyelenggarakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk jenjang pendidikan menengah, pada Tahun 2015, 2016 dan tahun anggaran 2017 dilanjutkan dengan pemberian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada Sekolah-sekolah, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomo 20 tahun 2003, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Secara khusus pemberian BPMU kepada jenjang SMK/SMA/MA, dilakukan guna membantu sekolah-sekolah/madrasah dalam memenuhi biaya operasional sekolah (Panduan BPMU Provinsi Jawa Barat, 2017) Efisiensi dan efektivitas manajemen pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis Kabupaten Ciamis akan di ukur tingkat keberhasilan penggunaan dana BPMU dalam membiayai semua program yang menjadi prioritas pengembangan madrasah. Indikator keberhasilan tersebut dapat diukur dari proses perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengawasan/kontroling, pembiayaan pendidikan, penyerapan anggaran serta kelancaran proses pembelajaran, baiknya perilaku siswa, prestasi sekolah baik akademis maupun non akademis.

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MAN 2 Ciamis merupakan lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama RI yang berada di Kabupaten Ciamis. Lembaga ini memiliki pembiayaan dan kualitas layanan yang cukup baik di antara sekolah Islam di Kabupaten Ciamis baik negeri maupun swasta. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya peserta didik dan pengembangan bangunan sekolah yang semakin baik serta sarana-prasaranya yang terpenuhi, program unggulan yang dijadikan ciri khas MAN 2 Ciamis, prestasi akademik maupun non akademik. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ciamis merupakan madrasah Keterampilan yang merupakan alih fungsi dari PGAN sejak tahun 1992. Dalam kiprahnya senantiasa mengoptimalkan integritas perhatiannya pada pencapaian tujuan pendidikan. Yaitu melalui pemanfaatan dan pembenahan potensi yang dimiliki serta mengembangkan langkah-langkah yang efektif, inovatif dan produktif dalam menyelenggarakan pendidikannya. Sehingga diharapkan MAN 2 Ciamis mampu mewujudkan visi dan misinya agar berorientasi pada pencapaian tujuan

pendidikan madrasah, sekaligus tujuan pendidikan nasional yang pada gilirannya dapat membantu dan menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sudah banyak penelitian tentang pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan, namun yang fokus terhadap dana BPMU terhitung masih kurang bahkan hampir tidak ada. Hasil sejumlah penelitian tersebut memang bervariasi. Variasi temuan ini nampaknya bersumber dari keragaman konteks, pendekatan dan metode penelitian. Dari titik kekurangan dan kelemahan studi-studi yang ada, maka sangat diperlukan model pendekatan kualitatif. Selain itu, formula pengalokasian dana BPMU yang sesuai ketentuan juga harus dikritisi dari sisi keterkaitannya dengan kemampuan finansial madrasah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana pengelolaan dana BPMU di MAN 2 Ciamis dan dampaknya terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Fokus masalah dalam studi ini adalah manajemen pembiayaan Pendidikan BPMU dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan pada MAN 2 Ciamis dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan BPMU dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis? (2) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan BPMU dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis? (3) Bagaimanakah evaluasi dan pengawasan pembiayaan pendidikan BPMU dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis mengenai kondisi obyektif mengenai manajemen pembiayaan pendidikan BPMU di MAN 2 Ciamis, adanya uraian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti kaitannya dengan peningkatan mutu layanan pendidikan di MAN 2 Ciamis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar evaluasi untuk merumuskan kebijakan turunan terkait perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi dana BPMU di level madrasah.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka (Sudarwan, 2002:51). Menurut Bagda dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Maleong (2003:3) "metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati". Berkaitan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan tidak hanya melihat faktor uji pengaruh tetapi perlu bukti-bukti kualitatif yang mendukung validitas deskriptif dari penelitian ini. Penyesuaian metoda sangat diperlukan dalam menentukan tujuan dan keluaran dari penelitian. Oleh sebab itu pemilihan metoda penelitian manajemen sangat diperlukan, bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian (Darna & Herlina, 2018). Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif bersifat deskriptif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkap dilapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Satori dan Komariah, 2009: 28).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Penelitian

#### 1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan BPMU di MAN 2 Ciamis

Perencanaan pembiayaan BPMU di MAN 2 Ciamis dilakukan 2 (dua) kali dalam setiap tahunnya, yaitu yang pertama menjelang awal tahun pelajaran yaitu bulan Mei-Juni dan kedua bertepatan dengan awal tahun Anggaran yaitu bulan Januari, disesuaikan dengan Program Tahunan madrasah yang dituangkan dalam renstra MAN 2 Ciamis yang seluruhnya mengacu kepada pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari penetapan perencanaan pembiayaan BPMU di MAN 2 Ciamis adalah pendidikan yang efektif dan pendidikan yang efisien, penggunaan anggaran yang transparan dan pengimplementasian anggaran yang akuntabel serta peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan yang difokuskan kepada standar pembiayaan hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran BPMU yang dituangkan dalam Pedoman Pembiayaan Pendidikan BPMU Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pembiayaan pendidikan BPMU difokuskan untuk peningkatan mutu dan kualitas kerja dengan pembiayaan pendidikan yang tersedia dapat dilakukan dengan mengoptimalkan semua anggaran biaya yang sudah direncanakan. Untuk melaksanakan peningkatan mutu dan kualitas kerja dengan pembiayaan yang tersedia cukup untuk pembayaran honorarium guru honor, pembayaran honorarium TU honor, pembayaran honorarium pembina ekstra kulikuler dengan selalu menanamkan ruh keikhlasan pada seluruh elemen sekolah.

## 2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan BPMU di MAN 2 Ciamis

Penyaluran dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MAN 2 Ciamis dilakukan sesuai dengan juknis dan instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat biasanya ada edaran yang memberitahukan bahwa pencairan dana pendidikan BPMU sudah bisa dicairkan dan itu dilakukan sekitar bulan Mei sampai dengan Juni dan Agustus hingga Oktober untuk setiap tahunnya yang diawali pengajuan rencana pencairan berdasarkan rasio jumlah siswa dikalikan Rp. 500.00/siswa dengan mengisi formulir BPMU-A2c.

Penggunaan dana BPMU Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 dalam rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimum sekolah/madrasah, Peruntukan dana BPMU untuk SMA/SMK Swasta dan MA Negeri dan Swasta adalah untuk Belanja Operasi Personalia dalam hal membayar honor bulanan/kegiatan Guru Honorer yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasinya dan untuk membayar honor Tenaga Kependidikan Honorer. Standar pembayaran honorarium disesuaikan dengan standar yang diberlakukan di masing-masing sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan faktor keadilan dan beban kinerja masing-masing personil. Honorarium diberikan kepada guru honorer dan tenaga kependidikan honorer yang tercantum pada surat keputusan kepala sekolah.

## 3. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan BPMU di MAN 2 Ciamis

Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan BPMU di MAN 2 Ciamis dilakukan melalui pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan BPMU MAN 2 Ciamis, membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan dan penggunaan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan, yang dilakukan secara berkala dan rutin dan proses yang transparan. Pengawasan penggunaan dana BPMU tidak ada pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh komite sekolah. Meskipun demikian, komunikasi tetap dilakukan antara sekolah dengan pihak komite sekolah. Bendahara melaporkan penggunaan dana BPMU secara berkala kepada Kepala Madrasah sebagai bentuk pertanggungjawaban, sedangkan monitoring dan evaluasi dari eksternal dilakukan berupa laporan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi melalui Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan pada setiap semester paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala. Hasil akhir dari evaluasi pembiayaan BPMU di MAN 2 Ciamis adalah berupa laporan keuangan/pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara sekolah untuk kemudian diaudit/diperiksa oleh pihak-pihak tertentu baik dari intern maupun ekstern. Pelaporan yang dilakukan sekolah diperkuat dengan dokumen berupa laporan pertanggungjawaban keuangan BPMU di MAN 2 Ciamis.

### 3.2 Pembahasan

#### 1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan BPMU di MAN 2 Ciamis

Dalam manajemen pembiayaan, sekolah sebagai unit kerja yang bertugas mengelola keuangan yang diperolehnya dari berbagai sumber serta memiliki kewenangan dalam penggunaannya untuk berbagai kebutuhan sekolah seperti untuk membiayai proses belajar mengajar, melengkapi sarana sekolah, meningkatkan kesejahteraan pegawai sekolah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka sekolah harus mempunyai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang digunakan sebagai dasar untuk menyalurkan dan menggunakan sumber dana yang ada. Sebagaimana organisasi apapun perlu menentukan rencana dan pembiayaan dalam organisasinya baik swasta maupun pemerintah (Mulyatini, Herlina, & Mardiana, 2018)

RAPBS ini memuat jenis dan besarnya pendapatan serta jenis dan besarnya pengeluaran sekolah. Besarnya pengeluaran sekolah harus berlandaskan kepada besarnya pendapatan yaitu pengeluaran tidak boleh lebih besar dari penerimaan (asas anggaran berimbang) (Matin, 2014:77). Triangulasi peneliti berdasarkan data hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dipaparkan diatas, ditemukan

bahwa perencanaan pembiayaan di MAN 2 Ciamis perencanaan yang dilakukan bersifat umum, mencakup semua kebutuhan yang diperlukan dalam operasional sekolah. Pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah tidak terlihat jelas dalam perencanaan. Namun demikian, secara tidak langsung item-item pembiayaan yang terdapat dalam RABPS sesungguhnya ada yang mengarah pada peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah. Perencanaan yang bersumber dari dana BPMU dituangkan dalam RAPBS dengan mengacu pada RAPBS Tahun lalu dengan mengadakan musyawarah bersama yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, waka, komite dan guru apabila diperlukan.

Keterlibatan komite di sini hanya sebatas memberikan persetujuan atas RAPBS yang dibuat pihak sekolah, dan memberikan pertimbangan atau kebijaksanaan terkait dengan pembiayaan sekolah, yang menjadi skala prioritas utama adalah honorarium bagi guru honorer dan tenaga kependidikan dalam hal ini karyawan Tata Usaha termasuk pada kegiatan ekstrakurikuler. Prioritas tersebut dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan yang nantinya akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas mutu sekolah. Item-item pembiayaan tersebut secara eksplisit dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di MAN 2 Ciamis.

## 2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan BPMU di MAN 2 Ciamis

Dalam rangka melaksanakan RAPBS diperlukan program, kegiatan, dan sasaran dengan sumber dana yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini RAPBS yang bersumber dari dana BPMU di sekolah akan dijabarkan lebih rinci pada RKAS sesuai dengan format BPMU yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan dalam pelaksanaan pembiayaan BPMU adalah pembukuan keuangan. Semua transaksi berupa pengeluaran dan penerimaan akan ditulis dalam buku administrasi keuangan oleh bendahara BPMU. Pelaksanaan pembiayaan BPMU adalah mencakup kegiatan penyaluran dan pembukuan pembiayaan BPMU yang menjadi tugas bendahara BPMU atas persetujuan kepala sekolah. Dalam RAPBS yang pembiayaan bersumber dari dana BPMU di sekolah akan dijabarkan lebih rinci pada RKAS sesuai dengan format BPMU yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan dalam pelaksanaan pembiayaan BPMU adalah pembukuan keuangan. Semua transaksi berupa pengeluaran dan penerimaan akan ditulis dalam buku administrasi keuangan oleh bendahara BPMU. Pembukuan yang dilakukan sesuai dengan format administrasi keuangan BPMU yang meliputi BKU (buku kas umum), buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku berita acara penutupan kas dan realisasi penggunaan anggaran. Semua bukti empirik menjadi alat bagi pengawasan dalam bidang keuangan agar tidak terjadi kecurangan (Darna, Rosliyati, & Herlina, 2015).

## 3. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan BPMU di MAN 2 Ciamis

Evaluasi pembiayaan BPMU yang dilakukan di MAN 2 Ciamis berupa monitoring dan supervisi dilakukan baik intern maupun ekstern berupa pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BPMU. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BPMU diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan dari intern sekolah oleh komite dan dari ekstern sekolah oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi, dan Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota. Evaluasi pembiayaan di MAN 2 Ciamis yaitu meliputi pengawasan, monitoring dan pelaporan. Pengawasan dan monitoring dilakukan baik dari pihak intern dan ekstern. Pelaporan juga di tujukan pada pihak intern maupun ekstern yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BPMU di MAN 2 Ciamis, melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan yang bersumber dari dana BPMU dituangkan dalam RAPBS dengan mengacu pada RAPBS Tahun lalu dengan mengadakan musyawarah bersama yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, waka, komite dan guru apabila diperlukan. Jika diperlukan perubahan pada komponen tertentu maka akan diubah sesuai dengan petunjuk teknis BPMU dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menjadi skala prioritas utama adalah honorarium bagi guru honorer dan tenaga kependidikan dalam hal ini karyawan Tata Usaha termasuk pada kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan yang nantinya akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas mutu sekolah; (2) Pelaksanaan pembiayaan BPMU adalah mencakup kegiatan penyaluran dan pembukuan pembiayaan BPMU yang menjadi tugas bendahara BPMU atas persetujuan kepala sekolah. Dalam RAPBS yang pembiayaan bersumber dari dana BPMU di sekolah akan dijabarkan lebih rinci pada RKAS sesuai dengan format BPMU yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pembukuan yang dilakukan sesuai dengan format administrasi keuangan BPMU yang meliputi BKU (buku kas umum), buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku berita acara penutupan kas dan realisasi penggunaan anggaran; (3) Evaluasi pembiayaan di MAN 2 Ciamis yaitu meliputi pengawasan, monitoring dan pelaporan. Pengawasan dan monitoring dilakukan baik dari pihak intern dan ekstern. Pelaporan juga di tujukan pada pihak intern maupun ekstern yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BPMU di MAN 2 Ciamis, melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

#### Daftar Pustaka

- Enas et.al., (2015) *Pedoman Penulisan Usul Penelitian, Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah*, Ciamis: Program Pasca Sarjana Unigal.
- Herlina, E. (2017). Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Model Kerjasama Usaha Menengah Kecil Dan Mikro Dengan Usaha Besar Di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 1(1), 71-81.
- Darna, N., & Herlina, E. (2018). Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 5(1), 287-292.
- Komarlah, A., & Satori, D. A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Mulyatini, N., Herlina, E., & Mardiana, D. (2018). Penerapan Tahapan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 5(2), 327-332.
- Maleong, Lexy J. (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Matin, (2014), *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Kosep dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarwan, Denim, (2002), *Menjadi peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Darna, N., Rosliyati, A., & Herlina, E. (2015, May). The Implementation of Controlling, Coaching and Counseling; For solving corruption problem in Indonesia. In *International Conference on Economics and Banking (iceb-15)*. Atlantis Press.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
- \_\_\_\_\_, (2017). *Pedoman Pembiayaan Pendidikan BPMU Provinsi Jawa Barat*, Dinas Provinsi Jawa Barat.